

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Implementasi Kebijakan**

##### **2.1.1 Definisi implementasi**

Secara umum, pengertian implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sebagai pelaksana atau penerapan. Dari kedua istilah sebelumnya, berarti implementasi bisa dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan merumuskan bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana (alat) yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Implementasi kebijakan, secara sederhana berarti pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut dari sesuatu yang normatif dan pasif menjadi sesuatu yang aktif, aktual atau fungsional. Oleh karena itu tahapan implementasi kebijakan sering disebut sebagai salah satu tahapan yang paling krusial dalam keseluruhan proses kebijakan jika dikaitkan dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.

Bagaimanapun dalam dimensi praktisnya, kebijakan itu dikeluarkan untuk mengatasi persoalan guna mencapai tujuan sebuah organisasi. Sementara itu dalam proses mencapai tujuan itu kebijakan tersebut harus dirumuskan (planning), ditetapkan (ratification) diimplementasikan (actuating) dan kemudian dievaluasi (controlling). Oleh karena itu jika tahapan implementasi itu tidak bisa berjalan baik, maka tujuan yang dimaksudkan itu sulit dicapai, sekalipun

kebijakan itu secara normatif dinilai sangat baik, begitu juga upaya evaluasi dan pengawasannya.( Daradjat kartawidjaja 2018 : 76 )

Implementasi dapat dikatakan sebagai proses dari kebijakan yang merupakan suatu roda kebijakan dimana kebijakan itu dapat berjalan dengan adanya proses implementasi.

Menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Leo Agustino,2017:128) mengatakan:

“Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan.”

Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Van Meter dan Van Horn ( dalam Tresiana dan Duadji 2019 : 3 ) memandang bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Grindle ( dalam Tresiana dan Duadji 2019 : 2 ) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat di teliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan di mulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan , program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Istilah menurut Grindle diatas, menunjuk pada sejumlah kegiatan yang telah tersusun dan disalurkan untuk sasaran atau tujuan program. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil

kegiatan pemerintah. Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn bahwa tugas Implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik di realisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier ( dalam Tresiana dan Duadji 2019 : 3 ), mengartikan bahwa implementasi adalah pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang merancang implementasi kebijakan.

Menurut Leo Agustino (2017:129)” implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak.Hal ini di pertegas oleh Udoji dengan menuliskan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada formulasi kebijakan.

Lanjutnya, Leo Agustino mengatakan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan adanya tujuan atau sasaran, adanya aktivitas dan adanya hasil. Dari ketiga hal menurut Leo tersebut, maka implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehinggalah akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Studi implementasi kebijakan di bagi dalam tiga generasi, generasi pertama diwakili oleh studi pressman dan wildavsky yang berpokus pada bagaimana keputusan otoritas tunggal dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Hasilnya memberi pengakuan sifat atau hakikat implementasi yang kompleks. Generasi kedua terfokus pada determinan keberhasilan implementasi kebijakan, studi pada masa ini dibuat oleh Carl Van Horn dan Donald Van Meter serta

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Generasi ketiga terfokus pada sintesis dan pengembangan pendekatan implementasi kebijakan dengan locus (secara *multilevel*) dan fokus yang lebih kompleks sebagai proses dinamis. ( Tresiana dan Duadji 2019 : 10 )

Upaya untuk memahami berbagai fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor faktor apa saja (variabel penjelas) yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi tadi. Dari serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para ahli maka dapat dipetakan apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan implementasi suatu kebijakan. Berbagai peta tentang faktor-faktor tersebut terakumulasi menjadi apa yang disebut sebagai model implementasi kebijakan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa, implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik dalam menerapkan atau melaksanakan segala bentuk keputusan, program, dan proyek yang telah ditentukan yang juga mempunyai kepentingan sebagai faktor penentu kegagalan atau keberhasilan yang nantinya akan dapat disimpulkan bahwa program tersebut mempunyai dampak atau dapat mencapai suatu target tujuan atau tidak.

### 2.1.2 Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi dipahami sebagai pengelolaan hukum (karena kebijakan telah disahkan dalam bentuk hukum), dengan mengerahkan semua sumberdaya yang ada, agar kebijakan mampu mencapai dan mewujudkan tujuannya. Berbagai fakta menunjukkan bahwa, didalam implementasi terkandung proses yang kompleks dan panjang. Proses implementasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan dan memiliki payung hukum yang syah. Setelah itu tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan, mulai dari membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. ( Tresiana dan Duadji 2019 : 30 )

Implementasi dipahami sebagai kegiatan mendistribusi kan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan mun cul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. Tahapan implementasi sebagai "proses" dikatakan sebagai "jembatan antara dunia konsep dengan dunia realita. Dunia konsep tercermin dari kondisi ideal yang dicita-citakan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Sementara dunia nyata adalah realitas dimana masyarakat sebagai kelompok

sasaran kebijakan sedang bergelut dengan berbagai persoalan social, ekonomi dan politik. Implementasi dikatakan sebagai jembatan, karena melalui tahapan yang dilakukan oleh "*delivery mechanism*, yaitu ketika berbagai *policy output* yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran. ( Tresiana dan Duadji 2019 : 30 )

Gambaran proses implementasi dimulai dari penjelasan sebagai berikut bahwasanya sebuah kebijakan disusun untuk mencapai misi, mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Untuk mencapainya maka diperlukan *policy input*, salah satunya anggaran. Input berupa anggaran dari pemerintah akan diolah atau dikonversi menjadi keluaran kebijakan (*policy output*). ( Tresiana dan Duadji 2019 : 31 )

### **2.1.3 Pendekatan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi**

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti dalam (Tresiana dan Duadji 2019 : 42) ada 3 pendekatan dalam menganalisis implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut :

Pertama, Model Rasional (*Top down*) untuk mengidentifikasi faktor faktor yang menjadikan implementasi berhasil, Model ini menginterpretasi kan Generasi II. Beberapa ahli yang digolongkan sebagai penganut pendekatan *top down* adalah; Nakamura dan smallwood, Edward III, Grindle, Van Meter dan Van Horn, Hood, Gunn, Sabatier dan Mazmanian. Pendekatan *top down* menggunakan logika berfikir dari 'atas' kemudian melakukan pemetaan

"kebawah untuk melihat keberhasilan dan kegagalan kebijakan. Pendekatan ini sering disebut dengan "*policy centered*", karena fokus perhatian tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan tersebut ketika diimplementasikan mampu mencapai tujuannya atau tidak.

Analisis implementasi yang menggunakan Pendekatan *Top down* bertujuan untuk menjelaskan persoalan-persoalan (hambatan atau kegagalan) yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan. Secara garis besar.. tahapan kerja peneliti Generasi II yang menggunakan pendekatan *Top down* biasanya adalah sebagai berikut:

- a). Memilih kebijakan yang akan di kaji
- b). Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan
- c). Mengidentifikasi bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrument untuk capai tujuan dan sasaran kebijakan.
- d). Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai SOP yang ada).
- e). Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memiliki manfaat bagi kelompok sasaran
- f). Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima
- g). Analisis kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah dampak tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan

dalam dokumen kebijakan. Beberapa ahli di atas diklasifikasikan pengguna pendekatan *top down* karena cara kerja mereka yang memulai dengan memahami kebijakan dan melihat efektivitas pencapaian tujuan kebijakan di lapangan. Cara pendekatan itu disebut juga dengan *Command and control* (komando dan perintah).

Kedua, Pendekatan *Bottom Up*. Pendekatan ini merupakan kelompok yang melakukan Kritik terhadap model *Top down*, dalam hal pentingnya aktor lain dan interaksi organisasional: Karya Lipsky, Elmore, Hjern et al. Kritik terhadap pendekatan *bottom up* yang terlalu menyederhanakan realitas implementasi, cenderung instrumentalis karena hanya menaruh perhatian pada efektivitas implementasi kebijakan. Pendekatan *bottom up* menekankan pentingnya dua aspek, yakni: birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran (*target group*). Argumennya, pentingnya memperhatikan *street level bureaucrat* sangat terkait dengan posisinya dalam merealisasikan keluaran kebijakan (apabila keluaran dalam bentuk layanan) atau menyampaikan keluaran kebijakan tersebut kepada kelompok sasaran (apabila keluaran kebijakan berupa hibah, bantuan, subsidi dan lain-lain). Dengan perannya yang demikian, maka ia menempati posisi kunci yang akan menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Selain itu implementasi juga akan berhasil, jika sejak awal kelompok sasaran dilibat mulai formulasi sampai implementasi yang hal ini dilupakan oleh pendekatan *top down*. Langkah-langkah pendekatan

analisis dengan pendekatan *bottom down* menurut Purwanto dan Sulistyastuti dalam (Tresiana dan Duadji 2019 : 43) :

- 1) Memetakan stakeholder (aktor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah;
- 2) Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi;
- 3) Memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor di level atasnya;
- 4) Analisis bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama;
- 5) Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi (*policy maker*). Dengan pola di atas, maka tujuan analisis implementasi adalah untuk mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level dan motif ekonomi politik para aktor yang terlibat dalam implementasi. Pemetaan jaringan implementasi dan motif ekonomi-politik akan menjadi factor penting untuk menjelaskan sebab-sebab kegagalan/ keberhasilan implementasi suatu kebijakan..

Ketiga, Pendekatan *scientific* yang dikembangkan oleh Malcolm yang menyatakan bahwa variabel perilaku aktor pelaksana kebijakan akan lebih menentukan keberhasilan implementasi. Muncul pendekatan kontigensi atau situasional yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan banyak

didukung oleh adaptabilitas implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan ini relevan dengan generasi ketiga dalam studi implementasi yang melanjutkan dukungannya terhadap pendekatan *bottom up*, namun mereka lebih mengembangkan studi implementasi kearah yang lebih *scientific*.

#### **2.1.4 Faktor Penentu Implementasi Kebijakan**

Menurut Leo Agustino ( 2020 : 170-177 ) implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, jika subjek kebijakan tidak memakai cara yang ditentukan oleh kebijakan, atau pun jika subjek kebijakan berhenti mengerjakan apa yang ditentukan. Ada beberapa hal yang mengakibatkan satu implementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak, yaitu:

- a. Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.

Faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang legitimate. Apabila publik menghormati pemerintah yang berkuasa oleh karena legitimasinya, maka secara otomatis mereka akan turut memenuhi ajakan pemerintah melalui bentuk kebijakn.

- b. Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan

Dalam masyarakat yang digerakan oleh logika *rational choices* (pilihan rasional) banyak dijumpai individu atau kelompok warga yang

mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai suatu yang logis, rasional, serta memang dirasa perlu. Namun di sisi lain, masih terdapat individu, kelompok, atau masyarakat yang juga secara sadar belum dapat menerima dan melaksanakan kebijakan yang telah ada. Hal tersebut tidak mudah. Ini karena bermain di ranah 'kesadran' publik merupakan hal yang sulit, sebab pemerintah perlu merubah *mindset* masyarakat.

c. Ada atau Tidaknya Sanksi Hukum

Faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif adalah sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan (kendati dengan perasaan terpaksa) karena mereka takut terkena dampak sanksi hukum yang dijabarkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan, dan sanksi lainnya. Oleh karena itu, salah satu strategi yang sering digunakan oleh pembuat kebijakan agar subjek kebijakan menjalankan arahan kebijakan, maka sanksi hukum dihadirkan pada setiap kebijakan yang dibuatnya. Selain itu, subjek kebijakan seringkali mematuhi dan melaksanakan suatu aturan perundangan karena ia tidak suka dikatakan sebagai orang yang melanggar aturan hukum sehingga dengan terpaksa mereka melakukan apa yang diarahkan oleh kebijakan tersebut.

d. Kepentingan Pribadi atau Kelompok

Subjek kebijakan (individu maupun kelompok) sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu pelaksanaan kebijakan. Maka tidak heran apabila eektifitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.

e. Bertentangan Dengan Sistem Nilai Yang Ada

Implementasi kebijakan pun dapat berjalan efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada di suatu daerah.

f. Keanggotaan Seseorang atau Sekelompok Orang dalam Suatu Organisasi

Kepatuhan atau ketidak patuhan seseorang atau sekelompok orang pada kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak bergabungnya subjek kebijakan dalam suatu organisasi yang tengah membela suatu kebijakan, maka secara sadar ia akan mengikuti arah kebijakan organisasi. Tetapi sebaliknya, apabila tujuan organisasi yang dimasuki oleh subjek kebijakan tersebut bertolak belakang dengan ide an gagasan organisasinya, maka seargumentatif apapun kebijakan yang sudah diformulasi pemerintah untuk kepentingan publik akan sulit diterima oleh subjek itu. Dan realitas ini menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan dapat berjalan efektif.

g. Wujudnya Kepatuhan Selektif

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan dan kebijakan ang ditetapkan oleh pemerintah. Ini karena ada

sebagian besar masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tetapi tidak pada kebijakan lain. Seperti halnya, seorang pedagang kaki lima akan sangat patuh pada aturan lalu lintas jalan raya (ketika ia mengendarai motor), tetapi di sisi lain, ia justru tidak patuh pada kebijakan larangan untuk berdagang di kawasan bebas PKL. Aturan pertama dipatuhi atas dasar pemenuhan kebutuhan keluarga. Kepatuhan dan ketidak patuhan inilah yang dimaksud dengan kepatuhan selektif dan kondisi ini juga yang sangat menentukan efektif atau tidaknya implementasi suatu kebijakan.

h. Waktu

Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh faktor waktu. Seperti halnya, jika suatu masyarakat memandang suatu kebijakan bertolak belakang dengan kepentingan mereka maka warga akan berkecenderungan untuk menolak kebijakan tersebut. tetapi dengan berjalannya waktu, suatu kebijakan yang awalnya ditolak dan (mungkin) dianggap controversial bisa berupa menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.

i. Sosialisasi

Hal ini dapat dipergunakan untuk menilai efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan adalah dilaksanakan atau tidaknya sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan hal yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah melalui kebijakan yang

diformulasinya. Tanpa sosialisasi yang cukup baik, maka tujuan kebijakan bisa jadi tidak tercapai.

j. Koordnasi Antar-Lembaga atau Antar-Organisasi

Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan *stakeholder*. Oleh karena itu, koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan. Terkadang suatu kebijakan dianggap baik dalam segi konten tapi lemah dalam segi pelaksanaan. Realita ini sangat mungkin terjadikarena koordinasi antar lembaga atau antar organisasi yang seharusnya menjalankan dan atau mengawasi justru tidak melaksanakan koordinasi tersebut. Padahal apabila koordinasi itu dilakukan bukan tidak mungkin suatu masalah publik dapat diselesaikan dengan cepat.

## 2.2 Tinjauan Tentang Kebijakan

### 2.2.1 Definisi Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kebijakan itu sendiri dijelaskan sebagai suatu rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya).

Pada dasarnya Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Secara konseptual kebijakan publik dapat di lihat dari kamus administrasi publik Chandler dan plano mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap

sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.( Harbani Pasolong 2019 : 46 )

William N. Dunn (dalam Pasolong 2019 : 47 ) menyatakan bahwa :

kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Thomas R. Dye ( dalam Harbani Pasolong 2019 : 47 ) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Thomas R. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Sementara itu, menurut Chaizi Nasucha ( dalam Harbani Pasolong 2019 : 47 ) mengemukakan bahwa :

kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Dari berbagai uraian di atas, kebijakan publik dapat diartikan sebagai ketetapan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan, yang berorientasi tujuan dan bersifat memaksa untuk kepentingan seluruh

masyarakat. Dimana bobot kebijakannya bertingkat, tergantung dimana dan siapa yang menetapkan kebijakan tersebut.

Kebijakan publik merupakan bidang studi maupun bidang praktek yang luas dan kompleks, karena melibatkan berbagai unsur kehidupan serta berbagai unsur kepentingan. Ada dua unsur pokok yang tercakup dalam suatu kebijakan, yaitu: tujuan kebijakan (*policy objective*), serta cara atau peralatan yang digunakan untuk mencapai tujuan (*policy instrument*). ( Daradjat Kartawidjaja 2018 : 34 )

Menurut Daradjat Kartawidjaja ( 2018 : 32 ) mengatakan bahwa :

Kebijakan publik merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam suatu sistem politik, dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat sebagai sarana untuk terpenuhinya kepentingan masyarakat. Alokasi nilai-nilai tersebut dilakukan secara paksa berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Anderson ( dalam Winarno, 2016 : 21 ) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Kajian terhadap dimensi kebijakan publik sangat penting bagi administrasi publik, karena berkaitan dengan strategi yang harus diambil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi tersebut meliputi penetapan sasaran dan tujuan yang harus dicapai, serta perencanaan untuk menetapkan struktur organisasi badan pelaksana serta sumber-sumber lain yang diperlukan. ( Daradjat Kartawidjaja 2018 : 29 ).

Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi berupa pilihan tindakan-tindakan dari para pembuat keputusan atau pemerintahan kepada pelaksanaan kebijakan untuk memecahkan masalah yang ada dimasyarakat dengan cara mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut.

### **2.2.2 Proses Kebijakan**

Menurut AG. Subarsono ( dalam Harbani Pasolong 2019 : 49 ) menyatakan bahwa proses kebijakan publik dalam rangka memecahkan suatu masalah-masalah publik yaitu :

1. Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah yang dimana, bahwa hanya sebuah fenomena yang benar-benar dianggap sebagai masalah oleh seluruh masyarakat saja dan bukan sebagian masyarakat.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives / policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk

memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

### 3. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara lembaga atau keputusan pengadilan.

### 4. Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akansaling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implemntors*), namun beberapa yang lain mungkin ditentang oleh para pelaksana.

### 5. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya diuat untuk meraih dampak yang

diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan ini, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

### **2.2.3. Model – Model Kebijakan**

Dalam hal ini, seorang atau sekumpulan aktor kebijakan tanpa dilandasi pemahaman terhadap model kebijakan sangat potensial untuk mengalami kegagalan dalam merumuskan kebijakan publik. Walaupun demikian, dengan menyederhanakan situasi masalah, model kebijakan tidak dapat dihindarkan untuk menyumbang distorsi selektif atas realitas. Sesungguhnya terdapat beberapa model kebijakan, yang dapat digunakan dalam perumusan dan penentuan kebijakan tetapi hanya ada dua bentuk utama dari model kebijakan itu sendiri. (Lijan Poltak Sinambela, dkk 2019:41)

Menurut Lijan Poltak Sinambela, dkk ( 2019 : 41 - 42 ) Beberapa model yang dimaksud dapat dideskripsikan sebagai berikut :

#### **1. Model deskriptif**

Bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Model deskripsi digunakan untuk memantau hasil dari aksi kebijakan.

#### **2. Model normatif**

Model ini bukan hanya bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi, tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan

pencapaian beberapa utilitas atau nilai. Beberapa jenis model normatif yang digunakan oleh para analis kebijakan adalah model antri, yaitu model normatif yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum, model penggantian, yaitu pengaturan waktu pelayanan dan perbaikan yang optimum, model inventaris, yaitu pengaturan volume dan waktu yang optimum, model biaya-manfar, yaitu, perlunya keuntungan optimum pada investasi publik.

### 3. Model verbal

Model ini merupakan ekspresi dalam tiga bentuk utama, yaitu verbal, simbol, dan prosedural. Model verbal diekspresikan dalam bahasa sehari-hari. Dalam menggunakan model ini, analis bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argumen kebijakan, tetapi bukan dalam bentuk nilai nilai angka yang pasti. Model verbal secara relatif mudah dikomunikasikan ke publik dan berbiaya murah dan dapat mengandalkan debat publik. Keterbatasan model verbal adalah bahwa masalah yang digunakan untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implisit atau tersembunyi, sehingga sulit untuk memahami dan memeriksa secara kritis argumen tersebut secara keseluruhan.

### 4. Model Simbolis

Model ini menggunakan simbol statistik, matematik, dan logika. Model simbolis sulit untuk dikomunikasikan kepada publik, bahkan di antara para ahli pembuat model sering terjadi kesalahpahaman tentang elemen-elemen dasar dari model simbolis. Biaya model simbolis mungkin tidak lebih besar dari model

verbal. Namun, kelemahan praktis model simbolis adalah hasilnya mungkin tidak mudah diinterpretasikan, bahkan di antara para spesialis, karena asumsinya mungkin tidak dinyatakan secara memadai.

## 5. Model prosedural

Model ini menampilkan hubungan yang dinamis di antara variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi dan solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti seperangkat hubungan. Biaya model ini relatif lebih tinggi jika dibanding dengan model verbal dan simbolis.

### 2.2.4 Unsur-Unsur Kebijakan

Menurut Tachjan ( dalam Tresiana dan Duadji 2019 : 4 ) mengatakan bahwa unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

#### 1. Unsur pelaksana (*Implementor*)

Pelaksana kebijakan merupakan pihak – pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi. Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik. Unit-unit administratif atau unit-unit birokrat ini berfungsi sebagai wahana dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang berkaitan dengan proses kebijakan publik dilakukan.

#### 2. Adanya program yang akan dilaksanakan

Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana.

Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/ sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.

### 3. *Target group*

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima manfaat dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan diri terhadap pola-pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

Adapun sampai seberapa jauh mereka dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung pada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti : besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Adapun karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan dimana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial-budaya.

#### **2.2.5 Karakteristik Kebijakan Publik**

Menurut Anderson ( dalam Daradjat Kartawidjaja 2018 : 32 ), terdapat beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Harus mempunyai tujuan, atau berorientasi pada tujuan
2. Berisi tindakan atau pola tindakan dari pejabat-pejabat pemerintah
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya tentang apa yang akan dilakukan
4. Bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu), atau negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
5. Kebijakan publik yang positif selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan bersifat memaksa (otoritatif).

#### **2.2.6 Jenis – Jenis Kebijakan Publik**

Menurut Anderson dalam Harbani Pasolong 2019 : 48 ), mengatakan bahwa jenis jenis kebijakan terbagi lima yaitu :

- a. kebijakan substantif dan kebijakan prosedural.

Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilaksanakan.

- b. Kebijakan distributif , kebijakan regulatori dan kebijakan re-distributif.

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau sekelompok orang. Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

c. Kebijakan material dan kebijakan simbolis.

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

d. Kebijakan (*public goods*) dan (*private goods*).

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

## **2.3. Model Implementasi Kebijakan**

### **2.3.1. Teori George C.Edward III**

Menurut Edwards III untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sebagai beriku :

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunika.

Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

b. Sumber daya

Edwards III juga mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Dalam sumber daya, meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, informasi, wewenang dan fasilitas.

Indikator dalam variabel ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

1. Sumber daya manusia, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Diperlukan pula kecukupan manusia dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapitel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
2. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara

melaksanakan kebijakan implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan

3. Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata public tidak terlegitimasi, sehingga dapat meninggalkan proses implementasi kebijakan.
4. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staff yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi

Menurut Edwards III Disposisi dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak bisa.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

1. Kepatuhan Pelaksana, dalam melaksanakan kebijakantentunya harus dibarengi dengan kepatuhan para pelaku kebijakan agar kebijakan dapat berjalan baik sesuai tujuan.
2. Insentif, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan bagian sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standar Operational Procedure* (SOP) dan melaksanakan Fragmentasi.

Menurut Edwards III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu :  
“*Standard Operational Procedure* (SOP) dan Fragmentasi”.

*Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.

Edwards III menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”.

### **2.3.2. Teori Charles O. Jones**

Terdapat 3 (Tiga) macam variabel aktivitas yang perlu di perhatikan secara sesakma, yakni :

1. Organisasi pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
3. Penerapan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (*interpretation*), dan penerapan (*applications*), penulis memaknainya sebagai berikut.

Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan).

Kedua, aktivitas interpretasi (interpretation) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

### **2.3.3. Teori Van Metter dan Van Horn**

Model proses implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn mempunyai 6 (enam) variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Van Metter dan Van Horn sebagai berikut :

1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Metter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

## 2. Sumber-Sumber Kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakana adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

## 3. Komunikasi Antar Organisasidan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukurandan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk member perhatian yang besarkepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Oleh karena itu, menurut Van Metter dan Van Horn prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

## 4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakan

mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

#### 5. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Sekalipun dampak dari faktor-faktor ini pada implementasi keputusan-keputusan kebijakan mendapat perhatian kecil, namun menurut Van Meter dan Van Horn, faktor-faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.

#### 6. Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*)

Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi dimana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka

kemudian mengidentifikasi tiga unsure tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Seperti diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn, intensitas kecenderungan-kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan sikap menentang tujuan-tujuan program.

#### **2.4 Tinjauan Tentang Vaksinasi Covid-19**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 pada pasal 1 ayat (3) yaitu Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Mulai dari awal tahun 2021 hingga saat ini vaksin Covid-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan

solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan Covid-19. Program vaksinasi di Indonesia pertama kali dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021 yang suntikan pertamanya diberikan kepada presiden Joko Widodo.

#### **2.4.1 Efek Samping Vaksinasi Covid-19**

Seperti vaksin pada umumnya, vaksin covid-19 berpotensi mengakibatkan efek samping bagi penerimanya antara lain :

1. Demam
2. Lengan pegal
3. Mual
4. Meriang

Hal tersebut pertanda bahwa vaksin sedang bekerja dan tubuh sedang membangun antibody untuk melawan virus yang mungkin akan menginfeksi di masa yang akan datang. Efek samping biasanya berlangsung selama kurang 3 hari saja dan akan hilang dengan sendirinya.

#### **2.4.2 Manfaat dan Tujuan Vaksinasi Covid-19**

Vaksin memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan efek samping yang dihasilkan. Manfaat vaksin dapat memberikan antibody yang lebih tinggi dan memberikan proteksi terhadap virus covid-19.

Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap

penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok (*herd immunity*). Selain itu, vaksinasi Covid-19 juga dapat menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial serta ekonomi.

